

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua, sejak dahulu kala mereka sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai local yang diatur dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Dalam hal ini juga Manfaat Investasi cukup signifikan dalam membangun perekonomian suatu daerah, karena tujuannya sudah jelas yaitu bagaimana mencari keuntungan sehingga investasi sangat diperlukan di Kabupaten Kepulauan Aru dengan memerhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang kemudian diuraikan untuk menjawab permasalahan. Dilihat dari hasil dan pembahasan, Hak Masyarakat Hukum Adat masih belum dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian dibutuhkan perlindungan hukum Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru, bahkan keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Aturan-Aturan yang berkaitan dengan Hak-Hak bahkan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat (Tanah/Lahan), Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Kepulauan Aru.*

ABSTRACT

The district of the Aru there are less more 117 village or the country or fanua , from of old the they have lived in the from generation to generation , be in a relationship with the grandparents , as well as having local values arranged in adat law that are still recognized and obeyed in the life of the people of adat law from now and protected by law national as well as international law .In this case also investments significantly the build the economy an area , because it is evident that tujunnya which are how to seek benefits .Of so investing very needed at the district of the aru by taking into account the presence of the adat law .In writing this , the use writers type research which is a juridical normative by adopting both and rule that then outlined plans to .Seen from the results and the discussion , the rights of the community adat law still have not protected by the district government of Aru Island. Thus needed legal protection of the rights of the community adat law in, aru island but community involvement in the creation of rules relating to the rights of even the existence of the customary law.

Keywords: *Legal Protections for indigenous people, Customary Area (Land/Property) , The investment in Aru Island.*

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan puji penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebesaran dan kasih-Nya serta tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah yang dilalui penulis selama ini sehingga skripsi yang berjudul :
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT
WILAYAH ADAT (TANAH/LAHAN) DALAM PELAKSANAAN INVESTASI
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulis menyadari sungguh bahwa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi namun penulis bersyukur kemurahan Tuhan yang memberikan berbagai pihak untuk membantu dan mendorong penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Bapak Imam Priando, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
5. Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua merangkap anggota Tim Penguji Tesis, serta Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua merangkap anggota Tim Penguji Tesis;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Minat Hukum Bisnis, serta seluruh staf administrasi pada Sekertariat Magister Ilmu Hukum;

7. Seluruh rekan semasa kuliah yang telah banyak berbagi ilmu dan informasi yang saya butuhkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Sahabat-sahabat terbaik Lidya Josephine Yubagyo, S.H., Group Visioner (Zubairi, Ika, Bagus, Siwi dan Riyan)., Indra Karianga, S.H., Kakak Haikal Arsalan, S.H., Dinda Silviani, S.H., Kakak Alex, Juwita Singal, S.H., Monika Hukom., S.H., Andre Petrus Rakil, S.Pd dan Raden Mahendra Gustiar, S.H yang selalu menyemangati dan memotivasi bahkan telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis.
9. Keluarga Besar Leliak-Latuheru (Oma, Opa bahkan semua saudara) dan Keluarga Besar Kaianama (Ani, Cika, Une, Domi, Reyn, Mama Lili) yang selalu membantu secara material maupun moril.
10. Keluargaku, khususnya kedua orang tua tercinta; Papa Andi dan Mama Sany. Terima kasih atas doa yang selalu terurai dari bibir kalian. Atas motivasi, didikan yang baik dan benar. Tesis ini adalah tanda hormat dan baktiku kepada kalian bahkan merupakan langkah awal untuk membuat kalian bangga kelangkah-langkah berikutnya. Kupersembahkan Tesis ini sebagai tanda terima kasih dan cintaku yang mendalam untuk kalian.

Atas semuanya itu, tidak ada apapun yang bisa diberikan penulis, hanya doa yang tulus kepada Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 12 Oktober 2020

Penulis

Aprilia Stefany Leliak, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Negara Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2043).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru 2012-2032.
- Peraturan Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Pemerintah Negeri Horale, Kabupaten Maluku Tengah, Masohi.